



Judul : Penerbit Terbelenggu Regulasi dan Pembajakan Buku
Tanggal : Jumat, 22 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

MINAT BACA

Penerbit Terbelenggu Regulasi dan Pembajakan Buku

JAKARTA, KOMPAS — Ekosistem industri penerbitan nasional masih terbelenggu berbagai persoalan, mulai dari regulasi birokrasi yang dinilai belum berpihak hingga pembajakan buku yang sulit dibendung. Kondisi tersebut menjadi paradoks di tengah kembali tumbuhnya minat baca generasi muda.

Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Arys Hilman Nugraha mengatakan, pemerintah perlu memperluas akses terhadap buku berkualitas untuk memenuhi kebutuhan literasi generasi muda. Menurut dia, generasi Z dan alpha kini semakin aktif membeli buku dan mengunjungi perpustakaan sehingga menjadi harapan baru bagi budaya literasi Indonesia.

"Boleh jadi mereka lebih mencintai buku dan ilmu pengetahuan daripada kita, terutama mungkin daripada saya dari generasi *boomer*. Minat baca mereka ada, tetapi kebiasaan membacanya belum tentu terbentuk. Itu membutuhkan akses terhadap buku yang baik," ujar Arys dalam peringatan HUT Ke-76 Ikapi di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Namun, dukungan pemerintah terhadap dunia perbukuan juga dinilai belum konsisten. Ia menyoroti pemotongan anggaran lembaga yang berkaitan dengan buku dan literasi, seperti Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan Pusat Perbukuan.

Pada tahun 2026, Perpusnas hanya mendapat anggaran sebesar Rp 378 miliar dari besaran tahun sebelumnya Rp 721,7 miliar. Anggaran yang dipangkas 47,6 persen ini menjadi yang paling drastis dalam enam tahun terakhir.

Arys juga menyoroti kebijakan penggunaan dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan sekolah mengalokasikan minimal 10 persen dana BOSP untuk membeli buku. Sementara industri penerbit belum merasakan aliran anggaran tersebut.

"Ini adalah paradoks antara apa yang ditunjukkan sebagai kecintaan terhadap buku di

tingkat tertinggi *leadership* kita, tetapi tidak mewujudkan dalam implementasi anggaran," ucapnya.

Pembajakan

Masalah menahun terkait perbukuan ialah pembajakan buku yang hingga kini masih menjadi ancaman besar bagi industri penerbitan nasional. Salah satu akar persoalannya ialah perubahan aturan hak cipta yang menjadikan pembajakan sebagai delik aduan sehingga penegakan hukum dinilai melemah dan membebani penerbit. Kehadiran lokapasar digital juga dinilai semakin menguntungkan pelaku pembajakan buku.

Indonesia bahkan masih identik dengan isu pembajakan di mata negara-negara Asia Tenggara lainnya. Menurut Arys, dalam berbagai forum internasional, delegasi Indonesia hampir selalu diminta membahas persoalan pembajakan karena masalah tersebut dianggap belum terselesaikan di Indonesia.

"Pembajakan masih menjadi isu besar di Indonesia. Seharusnya kita sudah lepas dari persoalan itu, sementara negara-negara lain menganggap isu pembajakan sudah selesai. Ada kelemahan dalam undang-undang hak cipta kita," ujar Arys.

Selain itu, dia juga menyoroti regulasi sistem perbukuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 yang bias terhadap dua hal. Pertama, undang-undang tersebut dan aturan turunannya terlalu berfokus kepada buku pelajaran sekolah. Kedua, undang-undang tersebut juga terlalu fokus pada pembinaan hulu perbukuan, terutama pada sisi penerbit buku, dan memomorduakan masalah hilir berupa akses terhadap bahan bacaan dan budaya baca masyarakat.

"Ini mengakibatkan buku-buku terbaik dilahirkan, tetapi gagal untuk sampai ke tangan pembaca. Industri buku, terutama penerbit, dalam undang-undang tersebut diperlakukan berbeda. Dari sekian pelaku perbukuan, hanya penerbit yang terancam sanksi jika melanggar, yang lain tidak," ucapnya.

Untuk itu, Ikapi menyerah-

kan surat rekomendasi penyelesaian ekosistem perbukuan nasional kepada DPR melalui Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya. Rekomendasi tersebut memuat solusi terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk penanganan pelanggaran hak cipta dan maraknya peredaran buku bajakan.

Melalui dokumen itu, Ikapi berharap negara tidak hanya hadir sebagai pengawas, tetapi juga menjadi fasilitator dalam menyehatkan ekosistem perbukuan dan memperkuat budaya literasi menuju Generasi Emas 2045.

Terkait hal itu, Willy mengatakan, DPR tengah mengupayakan percepatan revisi UU No 3/2017 tentang Sistem Perbukuan. Revisi tersebut diharapkan melahirkan regulasi yang lebih adil, termasuk soal subsidi, keringanan pajak kertas, afirmasi, serta perlindungan honorarium bagi penulis, penerjemah, dan penerbit.

"Saya minta pajak kertas nol. Pajak penulis nol. Buku tidak sama dengan komoditas lain. Jangan pernah menyamakan buku dengan mobil atau barang dagangan biasa," ujar Willy.

Ia mendorong pemerintah memberikan subsidi terhadap buku sebagaimana subsidi terhadap kebutuhan pokok karena kebutuhan akan pengetahuan sama pentingnya dengan kebutuhan pangan. Ini termasuk dorongan untuk menyubsidi logistik dan distribusi buku agar akses membaca tidak hanya dinikmati masyarakat di Pulau Jawa.

Willy menegaskan, persoalan literasi sangat berkaitan dengan kemampuan masyarakat berpikir kritis. Karena itu, pemerintah wajib memastikan akses pengetahuan tidak menjadi hak istimewa bagi kelompok tertentu saja.

"Orang lapar butuh nasi, tetapi kepala lapar juga butuh pengetahuan. Itu buku. Selama ini subsidi pangan luar biasa, tetapi buku tidak mendapat subsidi. Ini tidak adil," ucapnya.

RUU Sistem Perbukuan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2026. Willy optimistis RUU ini akan mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto.

(TIO)